

DI KABUPATEN KARANGANYAR Ditugaskan 501 Polisi RW



KR-Abdul Alim

Apel Polisi RW di Mapolres Karanganyar, Senin (22/5).

KARANGANYAR (KR) - Dalam rangka mendukung program Kapolri tentang Polisi Rukun Warga (RW), Polres Karanganyar menerjunkan 501 personel. Keberadaan Polisi RW dimaksud untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat dan memaksimalkan peran polisi di masyarakat. Demikian diungkapkan Kapolres Karanganyar AKBP Jerrold HY Kumontoy dalam Apel Polisi RW di Mapolres, Senin (22/5).

"Untuk mendapatkan informasi langsung di masyarakat, aparat harus berada di tengah mereka. Sedangkan dalam upaya meningkatkan keberhasilan polisi, perlu adanya sinergitas dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat desa, meliputi bhabin-kamtibmas, babinsa, perangkat desa dan struktur pranata sosial lainnya yang ada di lingkungan RW," jelas Kapolres.

Disebutkan, di Kabupaten Karanganyar ada 17 kecamatan, 162 desa, 15 kelurahan dan 1.957 RW. Namun Polres Karanganyar telah menugaskan 501 personel Polisi RW atau baru sekitar 25,7 persen dari jumlah RW yang ada. Meskipun demikian, Polres Karanganyar telah menugaskan personel di seluruh RW, dengan sistem rangkap tugas, sehingga seluruh RW sudah ada Polisi RW.

Kapolres minta Polisi RW melaksanakan tugas dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Anggota wajib hadir di wilayah RW tempat bertugas. "Berikan kartu nama kepada Ketua RW, nomor hp dan masuk grup medsos di tingkat RW masing-masing. Polisi RW juga wajib melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Kapolres melalui Kasat Binmas," tegas AKBP Jerrold HY Kumontoy. (Lim)-f

DESA PEGANG PERAN PENTING PEMBANGUNAN

Budaya Gotong Royong Harus Dipertahankan

SUKOHARJO (KR) - Desa merupakan pemegang peran penting dalam pembangunan nasional. Atas dasar itu, pemberian bantuan keuangan desa merupakan stimulan dalam rangka membantu peningkatan pembangunan perdesaan sebagai upaya untuk membangkitkan kembali partisipasi masyarakat.

"Hal itu dimaksud agar budaya gotong royong tetap dipertahankan masyarakat desa di Kabupaten Sukoharjo khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya," kata Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam sambutan Pembukaan Kegiatan Percepatan Pencarian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Sosialisasi Pelaksanaan Digitalisasi dan

Literasi Keuangan di Lingkungan Pemkab Sukoharjo Tahun 2023, Senin (22/5) di Auditorium Wijaya Utama.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan Piagam Penghargaan dan Lencana Desa Mandiri kepada delapan kepala desa, dengan status Desa Mandiri berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022.

Menurut bupati, desa merupakan pemegang peran penting dalam pembangunan nasional. Bukan karena sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa melainkan desa memberikan sumbangsih yang besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan perdesaan sangat penting untuk kemajuan perekonomian desa agar bisa

bangkit dan masyarakat desa maju dan sejahtera. "Pembangunan desa harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa," tandas Etik Suryani.

Disebutkan, perkembangan teknologi digital makin berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian, tidak hanya pada sektor swasta tetapi juga di sektor publik. Pesatnya perkembangan digitalisasi keuangan publik di Indonesia, yakni dalam pengelolaan penerimaan dan belanja pemerintah, saat ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi sudah merambah hingga ke daerah.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, lanjut Etik, merupakan suatu upa-

ya mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi nontunai, berbasis digital. Cara tersebut untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Untuk meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan tekno-

logi, inovasi produk.

Bupati berharap seluruh pemangku kepentingan, utamanya para camat dan kepala desa, agar melakukan fasilitasi, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. (Mam)-f



KR-Wahyu Imam Ibad

Etik Suryani membuka acara Percepatan Pencarian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Sukoharjo.

PEMBANGUNAN BIDANG PERTANIAN DI TEMANGGUNG

Generasi Muda Dijadikan Penggerak

TEMANGGUNG (KR) - DPR RI dan pemerintah terus melakukan peningkatan kapasitas anak muda dan petani sehingga bisa mendapatkan kuantitas dan kualitas. Hal itu mengingat kebutuhan

produk olahan pertanian yang dibutuhkan masyarakat dari tahun ke tahun terus meningkat.

"Petani di Indonesia terus berkurang, yang tersisa kaum tua. Anak muda sebagai pewaris pertanian

harus didorong untuk tertarik terjun bidang pertanian," kata anggota Komisi IV DPR RI, Vita Ervina, Sabtu (20/5). Hal itu diungkapkan dalam bimbingan teknis bagi petani dan penyuluh pertanian wilayah koordinasi politik pembangunan pertanian Polbangtan Yogyakarta Magelang di Kabupaten Temanggung.

Dia mengatakan selama ini tidak banyak generasi muda yang tertarik di bidang pertanian sebab dinilai bergelut dengan lumpur atau budidaya, tetapi juga pengolahan. "Kami mendorong generasi muda untuk melirik dan terjun dibidang pertanian, sebab tetap potensial sebagai

bisnis dan penghidupan," tandas Vita.

Sebab, terang dia, kebutuhan akan pangan dan olahannya terus bertambah. Sehingga yang dibutuhkan adalah sentuhan agar kualitas sumber daya manusia meningkat dan terus berinovasi.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Djoko Budi Nuryanto mengatakan pemerintah fasilitasi petani khususnya petani milenial untuk terus berkembang dengan memberikan pelatihan dan berbagai bantuan sarpras pertanian. "Pemerintah melalui penyuluh pertanian maupun instansi yang lain terus berikan

pelatihan dan bimbingan untuk bertani secara modern sesuai kemajuan dan tuntutan jaman," jelasnya.

Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Dr Nurdayati mengatakan, diperlukan regenerasi dibidang pertanian. Polbangtan melakukan dengan bimtek, pemberian motivasi untuk bertani, mengakses dibidang permodalan dan pertanian organik.

Disampaikan, pada tahun 2023 pihaknya melakukan bimbingan teknis bidang pertanian di sejumlah daerah seperti Pati, Tegal, Purworejo Magelang dan Temanggung. (Osy)-f



KR-Zaini Arrosyid

Vita Ervina menyampaikan materi pelatihan teknis bidang pertanian di Kabupaten Temanggung.

HUKUM

DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI MAHKOTA Kedua Terdakwa Saling Membantah



KR-Juvintarto

Persidangan kasus pembunuhan pengusaha Yogya.

YOGYA (KR) - Sidang kasus pembunuhan pengusaha Morgan Onggowijaya (74) berlangsung maraton di PN Yogyakarta, Senin (22/5). Sidang dengan agenda pemeriksaan dua terdakwa RO (19) dan Ken (19) berlangsung dari pukul 10.00 hingga pukul 22.00 malam. Kedua Terdakwa saling menjadi saksi mahkota dalam peristiwa tragis malam hari di parkirannya McDonald Jalan Sudirman Yogyakarta 23 November 2022.

Terdakwa RO yang juga cucu korban Morgan, menyatakan dirinya tidak merasa ikut dalam perencanaan pembunuhan. "Saya hanya diajak GK yang menanyakan rencana saya malam itu yang akan mencari kebutuhan rumah bersama opa (korban) di Ramai Mall, dan diajak GK bertemu di McDonald Jalan Sudirman," ungkap RO dalam persidangan yang dipimpin hakim Gabriel Silagan SH MH.

RO menyatakan GK hendak bertemu dengan opanya karena hendak membicarakan masalah uang toko yang diambil RO dan ditransfer ke rekening GK. "Dari Toko Ramai saya (RO) dan opa (korban) menuju McDonald Sudirman. Di lokasi GK sudah menunggu," jelas RO.

RO sempat berbicara dengan GK, kemudian membeli minuman pesanan opa, yang menunggu di parkirannya mobil. Saat kembali ke mobil, RO melihat GK sudah mengecek opa dari belakang. "Saya berusaha mencegahnya, namun ditendang oleh GK," ungkapnya.

RO mengaku hanya bisa menuruti pe-

rintah GK untuk pegang tangan opanya yang sudah dalam kondisi lemas. "Kemudian GK minta saya membawa keluar mobil dan parkir di dekat Raminten, membetulkan posisi mayat opa agar nampak seperti orang duduk," terangnya.

Namun keterangan RO tersebut dibantah oleh GK dan menyatakan dirinya tidak tahu apa-apa, "Yang melakukan pengecekan dengan tali adalah terdakwa RO dari samping korban kemudian ditarik ke belakang," ucap GK yang kemudian memperagakan dengan petugas kejaksaan berperan sebagai korban disimulasikan dengan kursi di pengadilan.

Dalam persidangan ini penasihat hukum RO, Iwan Kuswardi SH, mencecar GK dengan pertanyaan seputar jejak digital sebelum terjadi peristiwa pembunuhan. Mulai dari GK meminta uang ke RO dengan menyuruh sebagai Om GK bernama Marcell dan meminta uang untuk ditransfer ke rekening GK. Bahkan Marcell yang tidak lain adalah Terdakwa GK mengenalkan anaknya kepada Terdakwa RO bernama Diana melalui aplikasi line. Dan dari chatt dengan Diana juga meminta uang kepada Terdakwa RO dan ditransfer ke rekening ke rekening GK.

Menurut Iwan Kuswardi, SH, yang didampingi advokat Kresno Edy Wibowo SH, dari jejak digital chat terdakwa GK terlihat ada rangkaian rencana pembunuhan yang diawali dari membeli sianida, obat busung yang diserahkan kepada RO dan puncaknya terjadi di malam yang tragis itu. (Vin)-f

KORUPSI PEMBANGUNAN GEDUNG SMPN 1 WATES Kejari Kulonprogo Tetapkan Dua Tersangka

WATES (KR) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo menetapkan dua orang tersangka dan telah melakukan penahanan terhadap keduanya dalam kasus korupsi pembangunan relokasi gedung SMPN 1 Wates di area sawah wilayah Kalurahan/Kapanewon Wates.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kulonprogo, Ardi Suryanto SH MH, kepada wartawan, Senin (22/5), mengatakan pihaknya telah menetapkan dua tersangka yakni JS dan S.

JS merupakan pejabat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo yang menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK). Sedangkan S perempuan warga Sleman merupakan Direktur CV BA yang menjadi rekanan pelaksana proyek pembangunan gedung SMPN 1 Wates.

"Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi termasuk JS dan S serta 3 saksi ahli, kami mene-

tapkan JS dan S sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung sejak Jumat (19/5)," jelasnya.

Pembangunan relokasi gedung SMPN 1 Wates menggunakan dana APBD. Kasus yang menyeret kedua tersangka ini terjadi pada 2018. Bermula dari laporan masyarakat adanya indikasi pembangunan tidak sesuai spesifikasi teknisnya sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 106.226.000.

"Kejari Kulonprogo menindaklanjuti laporan itu sesuai prosedur yang ada yakni proses penyidikan. Setelah cukup 2 alat bukti ditambah indikasi kuat kerugian negara, kita minta kepastian kepada ahli perguruan tinggi," ujarnya.

Kejari Kulonprogo meminta tim ahli dari Perguruan Tinggi Negeri untuk menghitung bagaimana kebenaran volumenya. Setelah ditemu-

kan ada yang tidak sesuai teknisnya, kemudian hasilnya dibawa ke Inspektoriat Daerah (Irda) setempat. Karena untuk menentukan kerugian negara salah satunya dari tim auditor Irda. Irda juga melakukan audit dan ditemukan kerugian negara.

Kedua tersangka sempat mengembalikan uang kerugian negara ke Kejari Kulonprogo. Uang itu beserta beberapa dokumen menjadi barang bukti dan pengembalian yang dilakukan setelah proses penyidikan berjalan tidak menjadikan kasus ini berhenti.

Saat ini tersangka JS ditahan di Rutan Kelas IIA Wirogandan Yogya, sedangkan tersangka S ditahan di Lapas Perempuan dan Anak Kelas IIB Wonosari Gunungkidul.

JPU Yogie Raharjo SH mengatakan, kasus ini sudah diserahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta. Jika tidak ada perubahan persidangan akan dimulai Kamis depan. (Dan)-f

TAK KUNJUNG DIANGKAT MENJADI ASN

Puluhan Guru Honorer Geruduk BKN Yogya

SLEMAN (KR) - Puluhan guru honorer K-2 Kabupaten Klaten Jawa Tengah, mendatangi kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional 1 Yogyakarta, Selasa (23/5). Mereka mempertanyakan kejelasan status yang tak kunjung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Padahal, mereka sudah dinyatakan lolos seleksi tes CPNS periode 2013/2014 dan telah mengantongi penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 2017 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Kita sudah beberapa kali ke sini, namun jawaban mereka selalu sama. Saat ini kami kembali datang untuk menuntut agar putusan yang sudah ada sejak 2017 ini, segera dilaksanakan oleh BKN Yogya," ucap salah satu guru honorer dari salah satu SD Negeri di

Wedi Klaten, Pipin Lestari.

Perempuan berusia 52 tahun itu mengatakan, BKN selalu mengatakan jika mereka hanya pelaksana teknis dan menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Pipin menyebut, ia dan teman-temannya juga telah mendatangi kantor KemenPAN-RB, namun perpanjangan tangan pemerintah itu malah menyatakan jika keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu tidak dapat dilaksanakan dengan dalih PP sudah kedaluwarsa.

"Jika putusan yang telah punya kekuatan hukum tetap ini dianggap tidak berlaku, lalu buat ada ada lembaga peradilan negara, lebih baik bubarkan saja," ujarnya.

Guru lainnya, Ariyani Su-

silowati, menyebut ada 296 orang yang bernasib sama seperti dirinya. Mereka tak hanya guru, namun juga penjaga sekolah dan tenaga honorer di bagian administrasi. Namun saat ini, tinggal 92 orang saja karena ada yang sudah meninggal atau telah mengikuti P3K.

"Kami sudah mengabdikan

selama 20 tahun dengan honor Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu perbulan. Honor itu pun tidak bisa langsung cair, tapi tergantung turunnya dana BOS. Kami berharap, ada kejelasan status kami, tidak terkatung-katung," pungkasnya sambil menyeka air mata. (Ayu)-f



KR-Wahyu Priyanti

Para guru dan tenaga honorer membawa poster dan spanduk saat mendatangi kantor BKN Regional 1 Yogyakarta.